BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Kerja Praktek

Masalah pengangguran merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan di negara Indonesia. Hal ini dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya jumlah pengangguran selalu mengalami peningkatan, dan masalah ini menjadi beban pemerintah untuk mencari solusi pemecahan dari permasalahan tersebut. Keadaan perekonomian Indonesia beberapa tahun terakhir sempat mengalamai keterpurukan. Hal tersebut diakibatkan oleh terjadinya krisis ekonomi di beberapa Negara yang berpengaruh terhadap Indonesia. Akibat krisis ekonomi tersebut, banyak usaha-usaha dan perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan beroperasi karena keadaan ekonomi yang tidak stabil sehingga banyak perusahaan yang terpaksa menutup usahanya karena sudah tidak mampu lagi menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasinya. Selain berdampak pada perusahaan, krisis ekonomi juga berdampak pada masyarakat karena daya beli mereka terhadap barang-barang kebutuhan pokok menurun sehingga tingkat kesejahteraan mereka menurun.

Namun, diantara perusahaan-perusahaan yang sulit beroperasi tersebut, masih terdapat beberapa bentuk usaha yang mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi dimana salah satunya adalah koperasi. Hal tersebut dikarenakan koperasi mampu menghimpun, memfasilitasi dan mendorong kemajuan ekonomi rakyat yang berpenghasilan rendah, sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah

terus bergerak untuk bergabung dengan koperasi agar dapat memajukan perekonomian rakyat yang nantinya juga akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kasmir (2007:102)

Koperasi hendaknya harus mampu memainkan peranan yang sungguh-sungguh dalam tata ekonomi Indonesia. Berdasarkan perkembangan dan aktivitas ekonomi dan pembaharuan kebijaksanaan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Perkoperasian di Indonesia disesuaikan dengan struktur demokrasi Indonesia. Pembangunan koperasi mulai menginjak taraf pembangunan, dibidang perkoperasiaan diintegrasikan kedalam pembangunan ekonomi, yang diarahkan untuk pembentukan tenaga entrepreneur skill di kalangan masyarakat baik konsumen maupun produsen. Kasmir (2007:22)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi bukanlah perkumpulan modal usaha yang mencari keuntungan semata, tetapi koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan memberikan harga semurah mungkin dan pelayanan sebaik mungkin.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menjelaskan bahwa bukan kemakmuran orang perseorang yang diutamakan melainkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama dan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Koperasi salah

satu sektor kekuatan ekonomi diharapkan menjadi soko guru perekonomian Indonesia, karena koperasi merupakan badan usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi Bangsa Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Perkembangan dalam usaha koperasi sangat di pengaruhi oleh banyaknya dibutur yang dimiliki. Sehingga apabila dari tahun ke tahun koperasi memiliki peringkat dalam keanggotaan maka dapat di katakan bahwa koperasi tersebut mengalami kemajuan. Sebaliknya jika debitur dalam suatu koperasi tersebut mengalami penurunan begitu pula dengan tingkat keuntungan koperasi, semakin banyak debitur maka tingkat keuntungan pada koperasi otomatis mengalami peningkatan dan jika debitur berkurang maka keuntungan yang di peroleh menurun. Suyanto dan Nurhad (2003:43)

Disamping banyaknya keanggotaan yang dimiliki belum tentu dapat menjamin tingkat kelangsungan koperasi dalam mencapai keuntungan. Pemberian Simpan Pinjam merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi untuk mengolah modal yang di miliki dari hasil donasi dan simpanan anggota untuk memberikan pinjaman kepada anggota dengan mengambil keuntungan dari pembayaran bunga dari anggota yang melakukan pinjaman.

Secara garis besar dengan melihat peluang dan kebutuhan ekonomi saat ini, Korps. Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI-KPKS) lebih murah dam mudah dibandingkan badan perkreditan lainnya seperti perbankan dilihat dari mudahnya persyaratan dalam proses Simpanan atau

Pinjaman, masyarakat umum akan lebih mudah bertransaksi dengan koperasi karena untuk menjangkau dan sleksi atas permohonan Pinjaman lebih mudah dari pada Pinjaman lainnya. Dalam KPRI-KPKS hanya memerlukan syarat sebagai anggota kemudian dengan mudah mendapatkan fasilitas berupa Simpan Pinjam. Bahkan apabila pegawai belum berstatus sebagai Pegawai Negeri tetap bisa menjadi bagian dari anggota KPRI-KPKS ini khusus untuk seluruh pegawai kesehatan di seluruh daerah Sumedang.

Keberhasilan dalam pengelolaan Simpan Pinjam tidak terlepas dari prosedur pemberian dan aturan yang dijalankan dalam pengelolaan koperasi ini kepada anggotanya. Prosedur pemberian pinjaman merupakan ketentuan yang menjamin hak pemberi pinjaman kepada peminjam agar peminjam dapat di kembalikan sesuai kesepakatan dengan kata lain bahwa prosedur pemberian pinjaman untuk melunasi pinjaman sesuai kesepakatan dengan peminjaman beserta bunga yang ditetapkan sehingga anggota bertanggung jawab dalam pemanfaatan kredit usaha sehingga dapat di salurkan kembali kepada anggota yang memerlukannya sehingga koperasi harus melakukan beberapa prosedur pemberian pinjaman dengan baik. Dalam kedala pemberian kredit biasanya macet dan kemungkinan terdapat kendala-kendala yang lain. Azhar Susanto (2007:243). Sedangkan proses simpanan sendiri merupakan bagian dari produk koperasi kepada para anggota yang ingin menyimpan dananya agar lebih aman dan menguntungkan.

Adapun masalah yang terjadi di KPRI-KPKS sendiri adalah mengenai system pencatatan laporan keuangannya yang masih terbilang sederhana belum

mengikuti aturan secara IFRS dan menggunakan aplikasi keuangan yang belum memadai padahal dalam perhitungannya terbilang harus memerlukan aplikasi keuangan yang mendukung namun karena keterbatasan pakar teknik informatika menjadikan sebagian pencatatan keuangan KPRI-KPKS dilakukan secara manual.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ini bertujuan untuk mendeskripsikan **"Tinjauan Atas Prosedur Simpan Pinjam pada Korps. Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI-KPKS)"**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Adapun tujuan dari kerja praktek antara lain :

1. Penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur simpan pinjam pada korps. pegawai republik indonesia koperasi pegawai kesehatan sumedang (KPRI-KPKS).
2. Untuk mengetahui hambatan prosedur Simpan Pinjam pada Korps. Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI-KPKS)
3. Untuk mengetahui solusi dari Simpan Pinjam pada Korps. Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI-KPKS)

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai Prosedur Simpan Pinjam pada Korps. Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI-KPKS).

1.3.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

   Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Prosedur Simpan Pinjam pada Korps. Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI-KPKS).

2. Bagi Instansi

   Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Prosedur Simpan Pinjam pada Korps. Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI-KPKS).

3. Bagi Peneliti Lain

   Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Prosedur Simpan Pinjam pada Korps. Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI-KPKS).

1.4 Tempat dan Waktu Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Kerja praktek dilakukan di Korps. Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI-KPKS) jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 75 Sumedang.

1.4.2 Waktu Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek dimulai sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan 28 Agustus 2015. Hal ini dapat dilihat pada table sebagai berikut

Table 1.1

Waktu Kerja Praktek

NO	Kegiatan	Jun'15	Jul'15	Agst'15	Sept'15	Okt'15	Nov'15
1	Persiapan						
	a. Pemberian Tugas KP	■					
	b. Pembuatan Surat KP untuk perusahaan	■					
	c. Penyampaian surat KP kepada perusahaan	■					
	d. Menerima surat tanda KP telah disetujui	■					
2	Pelaksanaan						
	a. Kerja praktek		■	■			
	b. Pengambilan data		■	■			
3	Pelaporan						
	a. Bimbingan kepada dosen pembimbing				■	■	■
	b. Pembuatan laporan KP					■	■
	c. Sidang KP						■